

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenamedia Group, 2018)
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Andi Hamzah, , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,: (Ghalia Indonesia,. Jakarta, 1983)
- Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia,” (Sinar Grafika ,Jakarta. 2008)
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1986)
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, (Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika 2018)
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia,, 2013)
- M.Husnu Abadi & Wira Atma Hajri, *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, edisi 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990)
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Jurnal

- Adena Fitri Puspita Sari & Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Kostitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1 Nomor 1 (2022): 686.
- Aditya Fariz Fadhilah Nugroho Adipradana, “Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Status Tersangka Masuk ke Dalam Objek Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya Bagi Hukum Acara Pdana.

- Akbar, Muhammad Rizal. "Kebijakan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan". *Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2016), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/998>
- Arsil, "OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (2)," *Kolom Arsil* (23 Oktober, 2017), <https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-2-lt59ed6f5dc63b6/>
- Bahrn. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*
- Bahrn. " Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Aasasi Manusia" *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Peneapan Tersangka Menurut* 220-239 Vol 17, No 2 (2017): 224, <https://media.neliti.com/media/publications/257140-penetapan-tersangka-menurut-hukum-acara-57b14c41.pdf>
- Eddy OS Hiariej "Operasi Tangkap Tangan" (02 April, 2020), <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>.
- Leo Christy Menoha Teslatu, "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK NO. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- Luthvi Febryka Nola, "Operasi Tangkap Tangan," in *Info Singkat Hukum Vol.V, No. 24/II/P3DII* (Desember, 2013), <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-211-375-20200705003532.PDF>.
- Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II (2015), 259.
- Rendi Yudha S <https://news.detik.com/kolom/d7476303/menafsirkan-kembali-kemutlakan-pemeriksaan-calon-tersangka>
- Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 4 Putusan MK," [h'ps://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace7b0037bc909749323033303236.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace7b0037bc909749323033303236.html)
- Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2): 119, <file:///Users/nicholasgagah/Downloads/473-Dokumen%20Artikel%20Utama-1608-3-10-20200228.pdf>.
- Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan, "Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka", *Iblam Law Review* (31 Januari 2024): 479-480, <ejurnal.iblam.acejurnal.iblam.ac>.
- Sekar Arum Kusuma Jati, "Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara Volume 2, No. 4* (2024): 156-168.
- Sujanarko, Pro dan Kontra Operasi Undercover dan Penjebakan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-1494d14d3a1807dcb47b161ea700f68f07.pdf>

- Tajudin I, "Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Padjdjaran Law Review Volume 3*, no. 1 (1 Desember 2015): 7, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426/298>.
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, "Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator," *RechtIdee, Vol. 15*, no. 1 (Juni, 2020): 10.
- Yusril Ihza Mahendra, "Kami Pegang Bukti Kesalahan Prosedur Penetapan Tersangka Dahlan", (Detiknews, 29 Juli 2015), <https://news.detik.com/berita/d-2977951/yusril-kami-pegang-bukti-kesalahan-prosedur-penetapan-tersangka-dahlan>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 12 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 tentang Penetapan Tersangka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Internet

"Putusan Hakim Preseden Buruk", Harian Kompas, 17 Februari 2015. Operasi Tangkap Tangan oleh KPK" (1 Februari 2017), <https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>

Wahyu Nugroho, "OTT Tak Relevan Lagi dalam Memberantas Korupsi?", *detikNews*, December 5, 2024.

Yusril Ihza Mahendra, "Kejaksaan Tak Konsisten Soal Putusan MK", *Tribunnews*, 28 Juli, 2015, https://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/28/yusril-ihza-mahendra-kejaksaan-tak-konsisten-soal-putusan-mk#google_vignette.